

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah Barat yang bermakna menyerahkan hak, wewenang, serta kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Konteks otonomi daerah ini dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam pengertian normatif Daerah otonom di dalam otonomi daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah otonom dalam menjalankan wewenangnya mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri merupakan tanggung jawab yang utama, terutama mengenai kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah menjadi unsur penting di dalam daerah otonom sebagai yang mengatur dan memikirkan nasib masyarakatnya karena pemerintah daerah memiliki posisi terdekat dengan masyarakat. Pemerintah daerah dapat mengetahui dengan nyata dan jelas kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian pemerintah daerah menjalankan sistem desentralisasi dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya dalam otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka otonomi daerah bertujuan untuk pencapaian efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pemerintahan Daerah secara konsep dijelaskan di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kelurahan merupakan bagian dari pemerintahan di tingkat terendah. Pemerintahan Kelurahan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan, diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintahan Kelurahan di pimpin oleh Kepala Kelurahan. Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat Kelurahan, membina perekonomian Kelurahan, mendamaikan perselisihan Kelurahan serta menentapkannya sebagai perubahan Kelurahan bersama Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPD).

Berkaitan dari uraian tersebut, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor: 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bekasi pada Paragraf II mengenai Tugas Pokok dan Fungsi, pasal 36 menjelaskan tentang Pemerintahan Kelurahan yaitu :

1. “Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota;

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan/Pemerintahan Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan/Pemerintahan Kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan Masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelurahan/Pemerintahan Kelurahan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya”.

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa salah satu dari tugas Pemerintahan Kelurahan ialah pemberdayaan masyarakat. Istilah pemberdayaan telah menjadi perhatian yang mendalam pada kesejahteraan sosial, khususnya masyarakat lemah dan kurang beruntung. Pemberdayaan mengandung makna sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan inspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintahan Kelurahan terutama Kepala Kelurahan sebagai pemimpin di kelurahan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh melalui proses pemberdayaan di tingkat Kelurahan. Melalui pemberdayaan

masyarakat dapat membangun kemandirian dan prestasi terutama dalam perekonomian pada kemampuan masyarakat. Dengan demikian, upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama idealnya dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat tersebut dapat berkembang.

Sebagai bagian dari wilayah Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat terdiri dari 6 Kelurahan yang masing-masing Kelurahan memiliki potensi yang berbeda-beda. Kelurahan Bintara merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah terdiri dari wilayah pemukiman dan wilayah industri. Di era globalisasi ini masyarakat harus mempunyai keahlian dan mampu bersaing dalam bidang ekonomi khususnya industri. Lahan-lahan sawah di Kelurahan Bintara sebelum berkembangnya industri cukup luas, namun dengan masuknya industri yang terus berkembang menghabiskan lahan sawah yang ada di Kelurahan Bintara. Masyarakat Bintara yang mayoritas petani kini beralih profesi menjadi beberapa profesi, diantaranya ialah ada yang bekerja sebagai tukang ojek, membuka usaha warung, usaha gallon, dan sebagainya.

Kemampuan masyarakat yang hanya mampu bertani idealnya dikembangkan agar tetap dapat mensejahterakan hidupnya dan meningkatkan perekonomiannya dalam segala bidang. Masyarakat Kelurahan Bintara sebaiknya di berdayakan agar kebutuhan hidupnya dapat terus terpenuhi, disinilah tugas pemerintah Kelurahan diharapkan dapat dijalankan. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat Kelurahan Bintara yang tadinya hanya mempunyai kemampuan bertani, dapat mengembangkan kemampuannya mengikuti perkembangan jaman dan teknologi sesuai dengan potensi yang ada di daerah Bintara.

Pemberdayaan masyarakat dimungkinkan banyak variabel yang perlu diperhatikan agar terlaksana dengan baik. Salah satunya ialah partisipasi masyarakat, keefektifan dan keefesienan pelaksanaan tugas aparaturnya Kelurahan

merupakan indikator yang diduga dapat mewujudkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Kepala Kelurahan memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai program yang dijalankan oleh Kelurahan, salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat, dan kepemimpinan Kepala Kelurahan merupakan unsur terpenting dalam penyelenggaraannya. Melalui kepemimpinan yang baik dari Kepala Kelurahan akan membuat tingginya partisipasi masyarakat dan meningkatnya semangat kerja pelaksana program Kelurahan sehingga dapat terciptanya masyarakat yang berdaya khususnya bidang ekonomi.

Fungsi yang diharapkan dari seorang Kepala Kelurahan Bintara agar dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat dari kepemimpinannya yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kegiatan dari program pemberdayaan pada tingkat atasnya. Dalam era demokratisasi dan reformasi sejauh ini pengembangan perilaku kepemimpinan pemerintahan menuntut kelincahan dalam mengembangkan pendekatan yang bebas dan kecenderungan dominasi, serta berusaha mengarahkan orientasi kepada masyarakat luas dengan meningkatkan kepekaan untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang termasuk saran, tanggapan, keluhan bahkan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan public.

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, serta melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya mempersoalkan sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, serta kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun

kritik-kritik di atas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya, permasalahan tidak dapat dipecahkan (Suriadi, 2005:56).

Pendekatan *top-down* tidak mengembangkan masyarakat untuk memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi setempat dan mengakibatkan ketergantungan. Namun masyarakat harus diberi kepercayaan dalam pembangunan, di mana hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai apabila masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri, sementara pemerintah dan lembaga lain memiliki peran sebatas mendukung dan memfasilitasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantar masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisis masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki. Mereka sendiri yang membuat keputusan-keputusan, rencana-rencana, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keefektifan kegiatan yang dilakukan.

Kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran antara lain karena kurangnya pemberdayaan masyarakat, bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah:

- “
1. Pembangunan hanya mementingkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan.
 2. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut.
 3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan masyarakat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut.
 4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan”.

(<http://www.pustakaonline.wordpress.com>)

Berkaitan dengan paradigma pembangunan di atas, maka implementasi penyelenggaraan pemerintahan mengindikasikan pola pemberdayaan masyarakat.

Pada umumnya indikator pemberdayaan masyarakat meliputi : (1) membangun pola partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan; (2) adanya kebertahanan dalam pembangunan; (3) menumbuhkan kemandirian masyarakat, dan adanya keberlanjutan dalam pembangunan (*sustainable*).

Pola pemberdayaan ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan, seperti pemberdayaan ekonomi, kegiatan sosial, maupun kegiatan pembangunan fisik (sarana dan prasarana) masyarakat baik yang diselenggarakan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Mengenai kegiatan program pembangunan fisik di Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat, dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Hasil Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Bintara , Kecamatan
Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025

No	KEGIATAN	Keterangan	Lokasi	SUMBER DANA		Progres
				Swadaya masyarakat	Dana Pemerintah	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengecoran Jl	1000m	Rw 01	50.000.000	150.000.000	75%
2	Pengaspalan Jl	p.120x1,4 m	JL Duku Rw 01	20.000.000	76.800.000	100%
3	Pengecoran Jl	100 x 4 x 0,10m	Jl. Bengawan Solo V rt 05/08	5.000.000	50.000.000	65%
4	Pengecoran Jl	160 x 3,5 x 0,10	Jl Garuda II RT.01 RW.09	35.000.000	168.000.000	75%
5	Pengecoran Jalan	95 x 3,5 x 0,10	Jl Bango III RT.5 Rw.09	22.000.000	99.750.000	50%
6	Plester, keramik, dan pengecatan	50m ²	Jl.intan Raya RW.13	10.000.00	90.000.00	100 %

1	2	3	4	5	6	7
7	Pembuatan Gapura RW	10	Jl Mutiara Raya RW.13	10.000.000	40.000.000	100%
8	Pembuatan Kantor RW	50 m2	RW.15	17.000.000	200.000.000	100%
9	Pembuatan Saluran air	1000 x 40 cm	RT 1.2.3.5 dan 6 RW.16	10.000.000	190.000.000	100%
10	PelebaranJldan Pengecoran jl	300m	RT.02 RW.18	3.000.000	10.000.000	100%
12	RuanganPosyandu RW	1 Unit, 50m2	RT.02 RW 18	5.000.000	15.000.000	100%
11	PasangGorong -Gorong	P 70 x 1 x 1	Jl Sungai Asahan 1 RT 01,5,6	5.500.000	50.000.000	100%
12	PelapisanHot mix	3 x 500 m	JlUdawa, JIKakrasana	35.000.000	200.000.000	100%
Rata-rata						85 %

Sumber : Laporan Pembangunan Infrastruktur Kel.Bintara 2026

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya bidang fisik terlihat bahwa realisasi pekerjaan rata-rata hanya mencapai 85 %. Berdasarkan pengamatan peneliti penyebab ketidaktercapaian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada bidang pembangunan fisik menurut dugaan penulis karena terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah:

1. Kurangnya peranan pemerintah Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dalam memberdayakan masyarakat bidang pembangunan fisik, tidak berjalannya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tersebut, karena tidak dilibatkannya masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan, di mana yang mengerjakan proyek pembangunan di Kelurahan tersebut adalah pemborong yang berasal dari

daerah lain, dan hal ini diperoleh dari hasil pra-penelitian dengan melakukan wawancara dengan Bapak Sudiman Ketua RW 013 pada tanggal 23 April 2026 mengatakan “ Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan fisik kami tidak pernah dilibatkan baik dari segi merencanakan pemabangunan maupun dalam pelaksanaannya”.

2. Sikap pemerintah Kelurahan yang acuh dan tak acuh terhadap masyarakat dalam pembangunan Kelurahan akan mematikan tradisi gotong royong masyarakat Kelurahan dan menjadikan masyarakat merasa tidak ikut memiliki dalam pembangunan yang dilakukan sehingga kemungkinan pembangunan tersebut akan cepat rusak karena tidak ada rasa memiliki dan tanggung jawab dari masyarakat terhadap pembangunan fisik yang sudah dilakukan, hal ini dibuktikan dengan pendapat dari warga masyarakat yaitu Bapak Bandrio yang merupakan Ketua RT 07 Rw 13 dalam wawancara pada tanggal 24 April 2026, yang mengatakan: “ Dalam pembangunan fisik di tempat kami, tidak pernah warga masyarakat diberitahu oleh aparat kelurahan mengenai kegiatan proyek pembangunan fisik baik melalui rapat-rapat atau melalui papan pengumuman”.
3. Informasi dan sosialisasi rencana pembangunan fisik yang kurang optimal, dan hal ini mengakibatkan masyarakat kurang mengetahui rencana pembangunan fisik tersebut sehingga kemungkinan sikap masyarakat kurang mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut, seperti menarik pungutan kepada pelaksana proyek.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian masalah di atas peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian, dengan judul: “ **Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pembangunan Fisik di Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas terdapat identifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan fisik di Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang fisik?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang fisik.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan fisik di Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang fisik.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja dalam mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang fisik.

1.4 Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian adalah hal yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti, berguna sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah, dan juga menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi pemerintah Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memberdayakan masyarakat, serta bermanfaat sebagai pedoman dalam mengevaluasi program untuk dapat meningkatkan kinerja di kemudian hari.

- c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi fakultas dan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa di masa mendatang.

1.5 Signifikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua, yaitu signifikasi akademik dan signifikasi praktis.

1.5.1 Signifikasi Akademik

Berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem layanan terpadu yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan sosial telah banyak dilakukan, jumlah kajian pustaka penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini terdiri jadi sepuluh junal, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh M.Wahyu Arbain pada tahun 2014, dengan judul penelitian : “Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara”.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang ada di Kelurahan Muara Jawa Tengah dilakukan dengan pemberian pelatihan yang bersifat industri seperti pelatihan Operator Pesawat Angkat, Driver, Menjahit, atau pun melalui rekomendasi magang kerja atau rekomendasi untuk berkerja. Dalam penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi masyarakat, LPMK menggunakan swadaya gotong royong masyarakat. Kemudian dalam mendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat adalah dengan mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi diantara keduanya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ella Yuvita Sari Wiranti pada tahun 2014, Adapun penelitian tersebut berjudul “Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun

2014”.. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Ella Yuvita Sari Wiranti menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang ada di Kelurahan Sungai Lekop dilakukan dengan pengikutsertaan Pemerintah Kelurahan Sungai Lekop, Badan Permusyawaratan Kelurahan Sungai Lekop, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan juga masyarakat Kelurahan Sungai Lekop. Di dalam penyusunan RPJM tersebut masing-masing lembaga Kelurahan Sungai Lekop memiliki kedudukan penting dalam penyusunan RPJM Kelurahan Sungai Lekop ini. Namun hasilnya belum maksimal dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam perencanaan pembangunan belum berkedudukan baik di Kelurahan Sungai Lekop. Hal ini terlihat dari Setiap kegiatan yang dilakukan belum membawa perubahan dalam pembangunan di Kelurahan Sungai Lekop, karena seharusnya pembangunan yang dimulai dari perencanaan akan melibatkan masyarakat, kenyataannya tidak semua masyarakat memahami tentang pentingnya ikut dalam suatu perencanaan pembangunan.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Rintaka Hargita Sandhi dengan judul penelitian : “Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan pembangunan di desa Karang Wuni Kecamatan Rongkop”, pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Proses perencanaan LPMD untuk pembangunan di Desa Karangwuni belum dilaksanakan secara optimal, dengan Beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing dusun belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan atau penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang desa. Ditingkat musrenbang desa beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke proses perencanaan pembangunan desa. Sedangkan dalam penelitian ini dengan kajian terdahulu terdapat perbedaan yaitu dari segi waktu, dan tempat penelitian yang akan dikaji.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Putri Ulfa Tari pada program studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi, tahun 2019 yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di kelurahan arab melayu kecamatan pelayangan kota Jambi”, pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Kendala yang dihadapi LPM kelurahan Arab Melayu sebagian besar yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat, karena masyarakat cenderung kurang tertarik untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan di wilayah Kelurahan, maka dari itu, kurangnya partisipasi masyarakat akan mengakibatkan rendahnya efektifitas LPM dalam pelaksanaan fungsinya sebagaimana mestinya, dan kurangnya kerjasama antara fasilitator Kelurahan dan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini dengan kajian terdahulu terlihat dari; tempat penelitian dan waktu penelitian yang dikaji.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Fifin Ayu Lestari pada program studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2019 yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di desa Patani Kecamatan Mappakasunggu kabupaten Kapalar”, pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Patani dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal, hal ini terlihat dari kurang berperannya pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dimana pihak LPM tidak menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan rapat bersama, sehingga tidak efektifnya penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat kepada LPM di Desa Patani. dalam penelitian ini dengan kajian terdahulu terdapat perbedaan yaitu dari segi waktu, dan tempat penelitian yang akan dikaji.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh saudara Fifin Ayu Lestari tertuju pada kurangnya peran LPM dalam menjadwalkan atau memberikan informasi tentang perencanaan pembangunan, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada peran LPM dalam menggerakkan masyarakat dalam partisipasi perencanaan pembangunan yang ada di Desa Patani.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan Bachtiar Rifa'i, tahun 2017 dengan judul "Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah khususnya para pengrajin krupuk ikan, cukup efektif digunakan dalam program pengembangan Labsite. Karena pemberdayaan tersebut dapat membantu para pengrajin krupuk ikan terutama pengrajin kecil dan musiman dalam meningkatkan pendapatan serta mengoptimalkan hasil produksi krupuk ikan.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Imron dkk, tahun 2012 dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama Di Desa Dawuhan, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Dawuhan adalah peternakan sapi yang sifatnya adalah usaha sampingan karena pekerjaan mayoritas masyarakat adalah buruh tani, sementara untuk perawatan dan pengembangbiakkannya dilakukan secara terpisah.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan Bachtiar Rifa'i, dengan judul penelitian "Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo", dalam Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 1 No. 1, Januari 2017 penguatan kelembagaan yaitu dengan jalan meningkatkan intensitas pertemuan dan pembinaan kepemimpinan kelompok, sedangkan dalam administrasi keuangan sudah bersifat transparan dan mempunyai akuntabilitas. Persamaan dari penelitian ini yaitu pemberdayaan melalui kelompok usaha. Sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitiannya be pemberdayaan pada sektor pertanian sedangkan penelitian ini pada sektor perikanan. Perbedaan penelitian terdahulu lebih condong membahas tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha. Sedangkan penelitian

saat ini yang saya lakukan membahas tentang pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui agrowisata belimbing.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Yoanindha Adhena Shintia, tahun 2018 dengan judul “Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Blitar Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat” bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemerintah kota Blitar dalam program pemberdayaan masyarakat di kelurahan Karangsari dengan melalui komoditas belimbing. Dalam penelitian ini strategi komunikasi diperlukan terkait dengan tujuan dari pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk mengubah perilaku dalam artian mengubah perilaku masyarakat dari yang tidak mampu menjadi mampu yang kaitannya dengan ranah.

1.6 Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan penulis bahwa pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Pembangunan Fisik di Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi belum dilaksanakan dengan optimal, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori pemberdayaan masyarakat, teori tentang pemberdayaan masyarakat bidang fisik, teori-teori yang mendukung penelitian, kerangka pemikiran serta definisi operasional.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian deskriptif analisis, teknik-teknik pengumpulan data (observasi, dokumentasi, wawancara dan kuesioner, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini diawali dengan menyajikan gambaran umum Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Profil Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, adanya Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi pada Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, kemudian menyajikan pembahasan mengenai pelaksanaan indicator-indikator dari teori pemberdayaan yang dibahas dalam penelitian dan menyajikan hasil dari penelitian.

Bab V Kesimpulan

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian, analisis hasil angket dan wawancara dengan pegawai di Kantor Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, kemudian memberikan rekomendasi berupa saran kepada Kepala Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.